

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

\_\_\_\_\_

7

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						<input checked="" type="checkbox"/>							

# BPK Didorong Transparan Audit Kasus Jiwasraya-ASABRI

**BPK sebagai garda penting dalam barisan yang mendukung penegakan hukum harus independen.**

**DIAN WAHYU KUSUMA**

**B**ADAN Pemeriksa Keuangan diminta transparan dalam mengaudit kerugian negara dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI. Pasalnya, muncul dugaan adanya laporan audit ganda hingga tidak adanya rekomendasi pemeriksaan salah satu grup usaha yang turut terlibat.

"Tsu laporan audit ganda oleh BPK harus bisa diungkap penegak hukum secara faktual agar tidak menjadi liar. Sebab, kasus Jiwasraya dan ASABRI masih akan panjang, waktu akan bicara, dan kebenaran tidak akan pernah dikalahkan perbuatan jahat," ujar mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen, Selasa (29/6).

Halius menambahkan peran para kuasa hukum menjadi sangat penting dalam menilai secara proporsional, terutama terkait dengan status aset yang disita sebagai barang bukti.

Tentunya, ujar Halius, dengan menghormati sepenuhnya keputusan yang telah ditetapkan majelis hakim.

Sebelumnya, tersangka Benny Tjokrosaputro pernah menyebut bahwa

Jiwasraya banyak bertransaksi dengan saham-saham Grup Bakrie, terutama sebelum 2008.

Benny mempertanyakan mengapa grup perusahaan tersebut tidak disidik. Pasalnya, jika diperhitungkan, jumlah kepemilikan saham Jiwasraya di Grup Bakrie jauh lebih besar dibandingkan perusahaan yang dikendalikannya.

“

**Itu bisa menjadi alat untuk menghukum personel beserta pimpinannya karena lengah dalam melakukan pengawasan.**

Menurut Halius, BPK sebagai garda penting dalam barisan yang mendukung penegakan hukum harus independen.

"Kalau sistem audit yang digunakan BPK saat ini sudah tidak mampu menjadikannya (independen). Saya mendorong untuk dilakukan revisi pada sistem audit BPK sehingga dapat menutup rapat semua celah baik internal maupun eksternal bermain," ujarnya.

**Investigasi**

Terpisah, pakar hukum pidana

Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan BPK merupakan lembaga negara yang semua hasil pekerjaan auditnya didasarkan pada keadaan riil.

"Jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan dari pekerjaannya, itu bisa menjadi alat untuk menghukum personel, beserta pimpinannya karena lengah dalam melakukan pengawasan," ujar Fickar.

Ia menambahkan jika ditemukan aduan laporan yang berbeda, harus diinvestigasi untuk menentukan mana yang benar. "Rakyat langsung maupun melalui DPR bisa mempersoalkannya. Lebih jauh jika ditemukan alat bukti, bisa dipidanakan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah menyebut pihaknya sedang menyisir aliran transaksi dan bukti percakapan dari perusahaan manajer investasi (MI) yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

"Yang jelas lagi persiapan untuk korporasi. Itu butuh data masih banyak. Contohnya rekening transaksi juga bukti percakapan, itu belum dipenuhi. Yang jelas anak-anak (penyidik) percepat," kata Febrie. (MEDCOM/MI/R4)

dian@lampungpost.co.id